



Perubahan Kebijakan Luar Negeri Swedia terhadap NATO sebagai Respons terhadap Invasi Rusia ke Ukraina (2022–2024)

Semeion El Sozo¹

¹Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, semeion22001@mail.unpad.ac.id

Corresponding Author: semeion22001@mail.unpad.ac.id¹

Abstract: This study analyzes the historical shift in Sweden's Foreign Policy from Neutrality to full NATO membership in direct reaction to Russian aggression in Ukraine. The research object is the strategic decision-making process that took place in Sweden during 2022. The study aims to identify the driving factors behind this policy change. The method employed is a qualitative case study. The analysis applies the framework of three levels of Foreign Policy change: the international system, domestic political dynamics, and the individual. The results show that the threat from the international system level was triggered by the Russian Invasion, which fundamentally changed the regional security structure and eliminated the basic assumption of neutrality. Pressure from the domestic political dynamics level was also crucial, marked by the historic change in the Social Democratic Party's stance and Finland's accession decision, which created the need for a unified Nordic alliance. Furthermore, the crucial role of the individual level (the contemporary government leadership) was instrumental in articulating the new threat and mobilizing support for NATO accession in a short time. The study concludes that the NATO membership decision was a rational, swift, and pragmatic response to guarantee Sweden's national security in a drastically changing geopolitical environment.

Keyword: Sweden, NATO, Neutrality, Russian Invasion, Foreign Policy Change

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perubahan historis Kebijakan Luar Negeri Swedia dari Netralitas menuju keanggotaan penuh NATO sebagai reaksi langsung terhadap agresi Rusia di Ukraina. Objek risetnya adalah proses pengambilan keputusan strategis yang berlangsung di Swedia pada tahun 2022. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Analisis menerapkan kerangka tiga level perubahan Kebijakan Luar Negeri: sistem internasional, dinamika politik domestik, dan individu. Hasil menunjukkan bahwa ancaman dari level sistem internasional dipicu oleh Invasi Rusia, yang secara fundamental mengubah struktur keamanan kawasan dan menghapus asumsi dasar netralitas. Tekanan dari level dinamika politik domestik juga krusial, ditandai perubahan sikap bersejarah Partai Demokrat Sosial dan keputusan aksesi Finlandia yang menciptakan aliansi Nordik seragam. Peran krusial dari level individu (kepemimpinan pemerintah saat itu) menentukan dalam mengartikulasikan ancaman dan memobilisasi dukungan untuk aksesi NATO dalam waktu singkat. Kesimpulan studi ini

menegaskan bahwa keputusan keanggotaan NATO merupakan respons rasional, cepat, dan pragmatis untuk menjamin keamanan nasional Swedia dalam lingkungan geopolitik yang sangat berubah.

Kata Kunci: Swedia, NATO, Netralitas, Invasi Rusia, Perubahan Kebijakan Luar Negeri

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi yang dirancang suatu negara untuk menentukan posisinya dalam sistem global. Menurut James N. Rosenau dalam *Turbulence in World Politics* (1990), hubungan global tidak lagi semata-mata didominasi oleh negara-bangsa tetapi juga oleh aktor non-negara dan individu. Rosenau menekankan bahwa perubahan dalam kebijakan luar negeri bukan sekadar reaksi terhadap ancaman eksternal, melainkan merupakan respons kompleks terhadap interaksi antara dinamika sistem internasional dan politik domestik.

Dalam periode lebih dari dua ratus tahun, Swedia membangun identitas kebijakan luar negerinya berdasarkan prinsip netralitas dan non-alignment (Moloeznik, Willoughby, & Kamps, 2025). Prinsip ini telah secara formal diterapkan sejak berakhirnya Perang Napoleon dan telah terbukti efektif selama Perang Dunia I dan II. Arah kebijakan ini memungkinkan Swedia untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik-konflik besar di Eropa (Government of Sweden, 2023). Selama Perang Dingin, netralitas bertindak sebagai strategi penyeimbang antara NATO dan Pakta Warsawa, menjaga otonomi strategis negara (Simons, Persson, & Hedlund, 2019). Netralitas Swedia bertindak sebagai strategi penyeimbang yang hati-hati antara Blok Barat (NATO) dan Blok Timur (Pakta Warsawa). Komitmen ini merupakan hasil dari keputusan strategis jangka panjang dan bukan dari hasil sikap pasif Swedia, identitas ini memberikan Swedia reputasi sebagai *force for good* dan sebagai aktor mediator di kancah global (Mitchell, 2024). Kekhawatiran utama Swedia pada masa itu adalah jika mereka bergabung dengan NATO, Uni Soviet kemungkinan besar akan memaksa negara tetangga, Finlandia, untuk bergabung dengan Pakta Warsawa (Moloeznik et al., 2025).

Meskipun memegang teguh netralitas, para akademisi mengakui bahwa Swedia secara historis selalu condong ke blok Barat dan bukan ke Soviet/Rusia (Blockert, 2025). Dengan bubarnya Blok Komunis antara tahun 1989 hingga 1991, Swedia mulai mengevaluasi kembali posisi non-aliansi. Langkah besar pertama dari non-blok adalah pada tahun 1995, ketika Swedia secara resmi menjadi anggota penuh Uni Eropa meskipun masih mempertahankan sikap non-aliansi militer (Moloeznik et al., 2025). Pada tahun 1994, Swedia bergabung sebagai anggota Partnership for Peace (PfP), sebuah konsorsium yang disponsori NATO untuk mempromosikan kerja sama militer. Keanggotaan dalam PfP menjadi langkah penting yang membantu mengintegrasikan militer Swedia melalui latihan bersama dan penggunaan peralatan yang kompatibel dengan "ekosistem Barat" (Moloeznik et al., 2025; Blockert, 2025).

Meskipun non-aliansi, Swedia memiliki kerja sama erat dengan negara-negara Nordik anggota NATO, yaitu Denmark dan Norwegia, dan juga telah lama mengadakan latihan militer bersama dengan negara-negara NATO (Blockert, 2025). Ancaman baru yang nyata bagi kawasan Baltik muncul setelah invasi Rusia ke Georgia pada tahun 2008, yang mendorong Swedia dan NATO untuk kembali memfokuskan perhatian pada Rusia. Di dalam negeri, partai-partai sayap kanan-tengah Swedia, seperti Partai Liberal dan Moderate, sudah mendukung keanggotaan NATO sejak tahun 1990-an (Moloeznik et al., 2025). Dukungan politik domestik ini semakin bertambah ketika invasi Rusia ke Krimea pada tahun 2014, yang membuat Partai Center juga bergabung dalam seruan keanggotaan NAT. Insiden Krimea menunjukkan kepada Swedia bahwa negara tetangga yang non-aliansi tetap rentan terhadap serangan tanpa provokasi, sehingga membenarkan perubahan bertahap menuju peningkatan

kerja sama keamanan. Swedia mempertahankan citra ini pasca-Perang Dingin melalui keterlibatan dalam misi perdamaian dan kemitraan seperti NATO's Partnership for Peace sejak 1994, tanpa terikat jaminan keamanan kolektif (Moloeznik et al., 2025, Atlantic Council, 2024).

Situasi berubah secara drastis ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Dalam waktu singkat, Swedia bersama Finlandia secara resmi mengajukan aplikasi keanggotaan NATO dan memanifestasikan perubahan kebijakan yang sangat signifikan dari prinsip historisnya. Sebelum invasi, mayoritas publik Swedia menolak keanggotaan NATO dengan dukungan hanya sekitar 27% (Mitchell, 2024). Namun, setelah pengumuman pemerintah pada Mei 2022, dukungan publik melonjak tajam hingga 64% (Bjereld & Oscarsson, 2023). Selain itu, faktor penting dari dinamika domestik adalah perubahan sikap elite politik, khususnya Perdana Menteri Magdalena Andersson dan Partai Sosial Demokrat, yang secara tradisional mempunyai posisi anti-NATO tetapi akhirnya menyatakan bahwa keanggotaan adalah langkah terbaik bagi keamanan nasional (The New York Times, 2022).

Keputusan Swedia meninggalkan netralitas didorong oleh beberapa faktor krusial. Pertama, munculnya kesadaran strategis terkait keterbatasan kemampuan pertahanan Swedia dalam menghadapi ancaman militer skala besar, meskipun sudah ada peningkatan belanja pertahanan sejak aneksasi Krimea 2014 (Podvorna, 2024). Invasi Rusia memperjelas perbedaan mendasar antara kemitraan dengan NATO dan jaminan keamanan kolektif Pasal 5 yang hanya dimiliki anggota penuh (Atlantic Council, 2024). Kedua, tekanan eksternal dari Finlandia turut mempengaruhi; ketika Finlandia memutuskan bergabung pada Mei 2022, Swedia menghadapi risiko strategis jika tertinggal dalam perhitungan keamanan kawasan Baltik, terutama mengingat perbatasan panjang Finlandia dengan Rusia (Khorrami, 2024; Noreen, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana negara dengan tradisi netralitas panjang seperti Swedia merespons tekanan geopolitik ekstrem, khususnya invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhinya, termasuk interaksi antara opini publik, dinamika politik domestik, dan tekanan eksternal. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah: Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO terjadi pasca invasi Rusia ke Ukraina dan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan tersebut? Dengan menggunakan pendekatan multi-level berdasarkan teori Rosenau, penelitian ini mengeksplorasi kontribusi bersama dari aktor domestik dan dinamika sistemik terhadap keputusan Swedia untuk meninggalkan posisi netralnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif (qualitative case study) untuk memahami secara mendalam fenomena perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO pasca invasi Rusia ke Ukraina. Metode ini dipilih karena mampu memperjelas dan menangkap konteks fenomena, aktor, dan proses dari perubahan kebijakan tersebut. Metode ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan riset yang berjenis "how" dan "why" (Yin, 2018). Studi kasus menawarkan sejumlah keunggulan, diantaranya memungkinkan pemahaman mendalam (depth understanding) terhadap konteks sosial dan politik yang kompleks yang tidak dapat dicapai melalui pengukuran variabel (Miles & Huberman, 1994). Metode ini juga sesuai ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu kasus dalam konteks dunia nyata (Creswell, 2013), mengkaji interaksi antara fenomena dan konteks tempat peristiwa terjadi serta menangkap dinamika perubahan kebijakan dalam kondisi krisis yang bersifat tidak stabil dan saling mempengaruhi (Yin, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sikap resmi pemerintah Swedia terhadap NATO yang dikumpulkan melalui analisis terhadap pernyataan politik luar negeri,

dokumen resmi pemerintah, press release, serta jurnal dan artikel akademik. Data juga mencakup perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO setelah invasi Rusia, termasuk perbandingan kebijakan, pergeseran opini publik dan elit, dan narasi perubahan; faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan (keamanan, tekanan politik domestik maupun internasional, serta perubahan persepsi ancaman); dan dinamika keanggotaan Swedia di NATO, seperti proses ratifikasi dan sikap pemerintah setelah resmi menjadi anggota.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi digital, dan wawancara. Penelitian ini juga diperkaya dengan data hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Daniel Blockert, pada tanggal 12 November 2025 di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta. Wawancara ini memberikan perspektif diplomatik dan pandangan resmi mengenai sikap Swedia terhadap NATO, dinamika ancaman di Eropa, serta pertimbangan kebijakan yang melatarbelakangi keputusan Swedia bergabung dengan aliansi tersebut. Wawancara ini berfungsi sebagai sumber data primer yang memperkuat pemahaman peneliti mengenai kalkulasi strategis Swedia dalam merespons perubahan lingkungan keamanan regional pasca invasi Rusia.

Dalam studi ini, terdapat dua jenis unit analisis yang digunakan untuk memfokuskan kajian. Unit Analisis Independen adalah peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 yang dipandang sebagai pemicu utama perubahan dinamika keamanan Eropa, dan dalam studi kasus berfungsi untuk menelusuri faktor penyebab yang berdampak pada unit eksplanasi (George & Bennett, 2005). Sementara itu, Unit Analisis Eksplanasi penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO yang terjadi sepanjang periode 2022–2024. Unit eksplanasi ini merupakan fokus utama penelitian, dimana peneliti berupaya menjelaskan bagaimana perubahan tersebut berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang mendorong transformasi kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia dari posisi non-blok militer yang telah dipertahankan selama dua abad menjadi perubahan arah untuk bergabung dengan aliansi NATO pada tahun 2022 merupakan salah satu transformasi strategis paling signifikan dalam sejarah modern negara tersebut. Pergeseran ini tidak dapat dipandang sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antara dinamika yang beroperasi pada tiga level analisis: individu, domestik, dan sistemik. Ketiga level ini secara kolektif menghasilkan perubahan besar dalam kurun waktu yang sangat singkat. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 bertindak sebagai katalisator utama yang mempercepat realisasi persepsi ancaman yang telah lama ada, memaksa elite politik dan publik untuk mengevaluasi kembali posisi keamanan Swedia di Eropa (Blockert, 2025). Penjelasan mengenai perubahan ini menjadi sangat penting karena mencerminkan bagaimana sebuah negara dapat melepaskan identitas kebijakan luar negeri yang dipegang teguh di bawah tekanan krisis sistemik.

Level Individu: Pengambilan Keputusan Kritis

Pada level individu, peran elite politik (khususnya kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Swedia) memegang peranan penting dalam mendorong perubahan kebijakan terkait aksesi NATO. Partai ini secara historis merupakan partai pengusung netralitas dan terus secara konsisten mempertahankan posisi non-blok Swedia. Tetapi keputusan Perdana Menteri, Magdalena Andersson, untuk mendukung dan menekankan urgensi aksesi Swedia ke NATO, meskipun bertentangan dengan tradisi kebijakan partainya, menjadi faktor penentu dalam keseluruhan proses aksesi tersebut. Langkah ini menunjukkan dengan jelas betapa signifikan pengaruh seorang pemimpin politik dalam menentukan arah kebijakan pada situasi krisis.

Andersson mengambil keputusan dalam konteks ancaman mendesak setelah invasi Rusia, ketika pemimpin nasional harus memilih antara mempertahankan identitas lama atau

menjamin keamanan jangka panjang negara (Duxbury, 2022). Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Daniel Blockert, menggarisbawahi bahwa pergeseran ini tidak akan pernah terjadi tanpa keputusan krusial yang diambil oleh Perdana Menteri saat itu. Keputusan ini disebut oleh beliau sebagai perubahan cepat yang sebenarnya sangat tidak khas Swedia karena Swedia biasanya membuat kebijakan luar negeri melalui proses deliberatif yang sangat panjang (Blockert, 2025).

Perubahan mendadak dalam persepsi ancaman elite muncul dari analisis strategis bahwa invasi Rusia ke Ukraina bukan peristiwa regional biasa, melainkan indikasi agresi struktural yang dapat meluas ke kawasan Baltik atau bahkan Finlandia. Blockert menegaskan bahwa proses aksesi ini tidak akan terjadi jika tidak ada invasi Rusia ke Ukraina. Keputusan elite ini didasarkan pada cara pandang realistik, pragmatis, dan strategis yang berbeda dari pola penerimaan risiko sebelumnya. Elite Swedia menilai bahwa struktur keamanan lama (Partnership for Peace) tidak lagi memberikan jaminan keamanan yang memadai (Blockert, 2025).

Duta Besar Blockert menjelaskan juga bahwa perubahan posisi partai Sosial Demokrat merupakan faktor krusial dalam membuka jalan bagi aksesi NATO. Dalam percakapan dengan penulis, beliau menyatakan bahwa perubahan tersebut adalah sebuah perubahan besar internal partai dan menandakan bahwa keputusan Andersson dan partainya memiliki bobot struktural terhadap seluruh sistem politik Swedia itu sendiri (Blockert, 2025). Kecepatan pengambilan keputusan oleh elite politik Swedia merupakan anomali yang menunjukkan kuatnya peran agensi individu dalam situasi krisis. Duta Besar Blockert menyoroti bahwa perubahan kebijakan luar negeri Swedia biasanya melalui proses deliberatif yang sangat panjang dan hati-hati. Tetapi urgensi yang diciptakan oleh invasi Rusia memaksa para pemimpin untuk memangkas birokrasi tradisional demi keamanan nasional. Keputusan cepat ini membuktikan bahwa dalam kondisi ancaman eksistensial, persepsi dan tindakan pemimpin dapat mengalahkan inersia birokrasi yang telah mapan selama berabad-abad. Tanpa keberanian individu seperti Magdalena Andersson untuk mengambil risiko politik, transformasi bersejarah ini mustahil terjadi dalam waktu singkat (Blockert, 2025).

Faktor individu lainnya yang menonjol adalah persepsi spesifik elite Swedia terhadap kepemimpinan Vladimir Putin. Ketidakpercayaan elite politik Swedia bukan ditujukan kepada rakyat Rusia, melainkan secara spesifik kepada kepemimpinan Putin yang dinilai tidak lagi dapat dipercaya. Para pemimpin Swedia menilai bahwa jika Putin berhasil di Ukraina, ambisi ekspansionisnya sangat mungkin berlanjut ke negara-negara Baltik atau Finlandia. Penilaian risiko pribadi ini mendorong elite untuk mencari jaminan keamanan yang lebih pasti daripada sekadar kemitraan non-blok. Persepsi ancaman yang dirasakan secara personal oleh para pengambil keputusan menjadi determinan utama dalam meninggalkan kebijakan dua abad tersebut (Blockert, 2025).

Pidato Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai ambisi revisionis pribadinya yang melampaui logika sengketa geopolitik konvensional. Dalam deklarasi tersebut, Putin secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dari "operasi militer khusus" ini adalah untuk melakukan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina, sebuah terminologi yang menyiratkan penghapusan kedaulatan negara tetangga secara total. Ia membenarkan agresi tersebut dengan narasi emosional mengenai perlunya melindungi penduduk dari apa yang ia klaim sebagai "perundungan dan genosida" oleh rezim Kyiv selama delapan tahun terakhir. Lebih jauh lagi, Putin mengeluarkan ultimatum keras kepada pihak asing, memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi Rusia akan menghadapi "konsekuensi yang belum pernah ditemui dalam sejarah" (The Telegraph, 2022). Retorika ekstrem ini menunjukkan bahwa ambisi individu Putin beroperasi di luar kerangka hukum internasional dan didorong oleh obsesi historis untuk memulihkan dominasi Rusia di wilayah bekas Uni Soviet.

Dari perspektif psikologi politik, pidato ini bertindak sebagai titik balik kognitif yang mengubah secara drastis persepsi ancaman di kalangan elite politik Swedia. Ancaman terbuka Putin terhadap pihak eksternal dimaknai sebagai sinyal bahwa status non-blok tidak lagi menjamin keselamatan di hadapan seorang pemimpin otoriter yang bersedia mengambil risiko militer tinggi. Para pemimpin Swedia, termasuk Perdana Menteri Magdalena Andersson, menyimpulkan bahwa rasionalitas Putin tidak dapat lagi diprediksi menggunakan parameter diplomatik tradisional yang selama ini menjadi sandaran kebijakan luar negeri mereka. Ketidakpastian mengenai seberapa jauh ambisi pribadi Putin akan melangkah (apakah akan berhenti di Ukraina atau berlanjut ke Baltik?) menciptakan urgensi keamanan yang mendesak. Faktor kepribadian dan tekad destruktif individu Putin menjadi variabel independen yang krusial dalam mendorong Swedia untuk segera mencari payung perlindungan kolektif NATO.

Level Dinamika Politik Domestik: Perubahan Kebijakan Partai Sosial Demokrat

Pada level domestik, opini publik Swedia mengalami perubahan paling drastis dan tercepat sepanjang sejarah politik modern negara tersebut. Mitchell et al. (2024) menunjukkan bahwa pada gelombang survei pertama (Maret–April 2022) sebelum adanya keputusan resmi pemerintah, publik masih sangat terbelah dengan sekitar 40% masih menolak NATO. Ini membuktikan bahwa krisis itu sendiri tidak serta-merta menghasilkan dukungan mayoritas terhadap aksesi. Pergeseran paling signifikan baru terjadi setelah pemerintah dan partai Sosial Demokrat mengumumkan keputusan resmi untuk mengajukan keanggotaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh elit yang kuat terhadap opini publik (Mitchell, 2024).

Politico memaparkan bahwa perubahan posisi partai ini terjadi melalui proses politik internal berupa voting formal yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk mengakhiri kebijakan historis anti-keanggotaan NATO. Setelah diskusi intensif serta koordinasi dengan Finlandia, kepemimpinan Partai Sosial Demokrat kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa “the best thing for the security of Sweden... is to join NATO” (Duxbury, 2022). Keputusan ini menjadi salah satu u-turn terbesar dalam sejarah modern partai dan mengirimkan sinyal kuat kepada publik maupun aktor politik lainnya, terutama mengingat sejarah panjang kebijakan penolakan partai terhadap keanggotaan NATO. Transformasi kebijakan ini diinisiasi secara eksklusif oleh Partai Sosial Demokrat, sebuah fakta yang mencerminkan signifikansi peran partai tersebut dalam menentukan arah kebijakan nasional. Setelah sikap resmi ini diumumkan, partai-partai lain di parlemen pun dengan cepat menyelaraskan posisi mereka sehingga terbentuk konsensus domestik yang kuat dan memperlancar proses aksesi Swedia ke NATO.

Mitchell et al. (2024) menemukan bahwa sekitar 32% responden mengubah pendapat mereka dari gelombang survei pertama (T1) ke gelombang kedua (T2) yang dilakukan setelah keputusan pemerintah (Mitchell, 2024). Elite politik berhasil memimpin perubahan narasi dan pandangan publik yang kemudian secara efektif menghasilkan dukungan mayoritas untuk kebijakan baru tersebut. Ini sesuai dengan teori *rally around the flag*, dimana publik bersatu mendukung keputusan negara ketika elite politik memberikan narasi yang konsisten.

Selama periode krusial keputusan aksesi NATO, wacana media Swedia sendiri didominasi oleh narasi ancaman eksistensial yang kuat dan yang secara efektif membungkam suara-suara kritis (Blokcert, 2025). Setelah partai-partai besar, termasuk Demokrat Sosial mendukung keanggotaan, muncul sentimen publik dan politik yang sangat kuat bahwa aksesi tersebut merupakan kebutuhan mutlak sebagai respons terhadap Invasi Rusia. Dalam suasana ini, media Swedia mencerminkan dukungan yang masif sehingga nyaris mustahil bagi wartawan atau pihak lain untuk menyuarakan pandangan yang bertentangan atau mempertanyakan proses tersebut. Beberapa jurnalis senior yang berusaha menulis artikel untuk mempertanyakan keputusan, seperti “Apakah ini keputusan yang benar?” atau “Apakah

riset dan analisisnya sudah memadai?" langsung dituduh tidak patriotik. Situasi ini menciptakan iklim di mana seluruh upaya komunikasi publik diarahkan untuk mencapai satu tujuan: mendukung keanggotaan NATO (Blockert, 2025).

Meskipun narasi persatuan mendominasi dan berhasil mendorong aksesi, terdapat diskusi baru yang muncul kemudian yang mempertanyakan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil secara tergesa-gesa tersebut. Suara-suara kritis yang sebelumnya dibungkam kini mulai kembali muncul dalam diskusi publik, menyoroti implikasi yang kurang dianalisis selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun framing media berhasil menciptakan konsensus cepat, implikasi keanggotaan yang kompleks membutuhkan analisis berkelanjutan yang terlepas dari retorika ancaman awal.

Level Sistem Internasional

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi faktor sistemik terbesar yang memicu perubahan perhitungan strategis di Eropa Utara. Peristiwa tersebut menghancurkan asumsi stabilitas pasca-Perang Dingin yang telah diandalkan Swedia selama beberapa dekade. Ancaman yang muncul bukan lagi berupa ancaman abstrak tetapi agresi nyata terhadap negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan kawasan Eropa Utara. Dalam wawancara, Duta Besar Blockert menegaskan bahwa invasi tersebut memicu keseluruhan proses aksesi Swedia ke NATO (Blockert, 2025). Invasi Rusia secara langsung menunjukkan dampak sistemik terhadap dinamika politik internasional.

Finlandia, sebagai negara yang mempunyai perbatasan panjang dengan Rusia, mengambil keputusan jauh lebih cepat untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022, suatu langkah yang memberikan tekanan strategis besar terhadap Swedia. Politico menekankan bahwa kedua negara melakukan koordinasi sangat erat dalam menentukan langkah kebijakan mereka (Duxbury, 2022). Duta Besar Blockert mengkonfirmasi hal tersebut dengan menyebut bahwa Finlandia dan Swedia bergerak hampir serempak dan secara langsung menciptakan keputusan geopolitik paling signifikan di kawasan sejak Perang Dunia II. Keputusan dan konteks dinamika antarnegara tetangga ini memainkan peran sistemik yang krusial dalam aksesi Swedia. Keputusan keanggotaan ini menegaskan kebutuhan akan jaminan keamanan Pasal 5 (Article 5 security guarantee) yang merupakan inti dari konsep pertahanan kolektif NATO. Dengan bergabung kepada aliansi tersebut, Swedia kini mendapatkan komitmen pertahanan bersama yang tidak mungkin didapatkan dari status non-blok. Jaminan dari hasil sebuah keputusan yang didasarkan pada perhitungan keamanan pragmatis yang dominan di tengah perubahan lanskap ancaman Eropa.

Secara geopolitik, masuknya Swedia dan Finlandia membuat seluruh Laut Baltik menjadi wilayah yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara-negara anggota NATO (kecuali Kaliningrad). Keunggulan geografis ini memiliki signifikansi strategis yang sangat besar bagi Aliansi tersebut, terutama dalam mengubah gambaran geografi strategis Laut Baltik. Dengan garis pantai terpanjang di Laut Baltik, keanggotaan Swedia memungkinkan NATO untuk mengamankan jalur suplai vital ke negara-negara Baltik yang sebelumnya rentan terisolasi. Posisi ini secara efektif menutup ruang gerak armada Angkatan Laut Rusia dan mengisolasi eksklave Kaliningrad dalam skenario konflik. Integrasi kemampuan angkatan laut Swedia, seperti korvet kelas Visby yang dirancang untuk perairan dangkal, semakin memperkuat dominasi maritim aliansi di kawasan ini. Perubahan struktural ini menciptakan deterens yang jauh lebih kuat dibandingkan saat Swedia masih berstatus non-blok.

Dalam konteks pertahanan regional, Pulau Gotland memiliki peran sistemik yang sangat krusial sebagai "kapal induk yang tidak bisa tenggelam" di tengah Laut Baltik. Penguasaan atas pulau ini memungkinkan NATO untuk mengontrol lalu lintas udara dan laut di seluruh kawasan, sekaligus menjadi pusat logistik dan pangkalan aju bagi operasi pertahanan. Duta Besar Blockert dan analisis militer NATO menegaskan bahwa Gotland dapat menjadi platform untuk sistem senjata jarak jauh yang melindungi sekutu di sekitarnya.

Tanpa Swedia, pertahanan negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania) memiliki celah strategis yang sulit ditutup. Kehadiran Gotland di dalam payung NATO secara drastis meningkatkan kemampuan aliansi untuk merespons agresi dengan cepat dan efektif.

Selain dimensi maritim, integrasi Swedia juga memperkuat postur pertahanan NATO di wilayah "High North" atau Arktik yang memiliki kondisi ekstrem. Pasukan khusus seperti Brigade Norrbotten memberikan kemampuan perang musim dingin yang unik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga sayap utara aliansi dari potensi inkursi. Kerja sama pertahanan Nordik yang sebelumnya terfragmentasi kini menjadi satu kesatuan operasional yang utuh di bawah komando NATO. Kemampuan untuk beroperasi di medan yang keras dan infrastruktur yang terintegrasi di wilayah utara menutup celah keamanan yang sebelumnya dapat dieksplorasi oleh lawan. Hal ini memastikan bahwa sistem pertahanan Eropa Utara memiliki kedalaman strategis yang solid dan saling terhubung.

Dari perspektif realisme struktural, keputusan Swedia dan Finlandia merupakan respons langsung terhadap kegagalan sistem keamanan "zona abu-abu" pasca-Perang Dingin. Status sebagai mitra NATO tanpa jaminan Pasal 5 terbukti tidak memadai untuk mencegah agresi dari negara revisionis seperti Rusia. Tekanan sistemik memaksa negara-negara kecil untuk memilih keberpihakan yang tegas demi mendapatkan payung nuklir dan jaminan pertahanan kolektif. Sistem internasional yang kembali mengarah pada bipolaritas keamanan tidak lagi memberikan ruang aman bagi kebijakan netralitas tradisional. Akibatnya, struktur keamanan Eropa kini bertransformasi menjadi blok pertahanan yang lebih terkonsolidasi dan tegas.

Ironisnya, ekspansi ini merupakan "konsekuensi yang tidak diinginkan" (unintended consequence) terbesar bagi strategi geopolitik Rusia. Tujuan awal Rusia untuk mencegah perluasan NATO justru memicu hasil sebaliknya, yaitu penyatuan seluruh semenanjung Skandinavia di bawah bendera aliansi tersebut. Agresi militer yang dimaksudkan untuk menciptakan zona penyangga justru menghasilkan perbatasan NATO yang jauh lebih panjang dan kemampuan militer lawan yang lebih besar di ambang pintu Rusia. Kegagalan strategis Rusia ini menunjukkan bagaimana tindakan agresif dalam sistem internasional anarki dapat memicu penyeimbangan kekuatan (balancing) yang merugikan inisiatornya sendiri. Dinamika ini menegaskan bahwa perubahan struktur keamanan Eropa adalah hasil langsung dari interaksi aksi-reaksi antar negara di level sistemik.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO pasca invasi Rusia ke Ukraina merupakan sebuah transformasi strategis yang signifikan dan didorong oleh interaksi faktor individu, domestik, dan sistemik (internasional). Perubahan ini terjadi bukan karena satu variabel tunggal tetapi melalui rangkaian dinamika yang saling berhubungan. Invasi Rusia ke Ukraina bertindak sebagai peristiwa pemicu yang menghancurkan asumsi stabilitas keamanan Eropa Utara dan menggoyahkan fondasi netralitas Swedia yang telah dipertahankan selama dua abad. Situasi tersebut memaksa Swedia untuk meninjau ulang posisi strategisnya dalam lanskap keamanan regional. Dalam konteks ini, ancaman eksternal menjadi faktor awal yang memicu evaluasi ulang kebijakan Swedia.

Pada level individu, penelitian ini menemukan bahwa keputusan elite politik memiliki peran yang sangat menentukan dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri. Sosok seperti Perdana Menteri Magdalena Andersson menunjukkan bahwa kepemimpinan di masa krisis mempengaruhi arah kebijakan secara signifikan. Keputusan Andersson untuk meninggalkan posisi historis Partai Sosial Demokrat menjadi momentum yang membuka jalan bagi aksesi NATO. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa individu dalam posisi otoritas dapat mengubah orientasi kebijakan selama mereka didukung oleh penilaian ancaman yang jelas. Dalam kasus ini, perubahan persepsi ancaman yang dihadapi Swedia menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk keputusan besar tersebut.

Pada level domestik, penelitian ini menegaskan bahwa opini publik Swedia mengalami perubahan yang cepat setelah elite politik mengumumkan keputusan untuk mengajukan keanggotaan NATO. Perubahan ini membuktikan bahwa publik merespons sinyal dari elite, terutama pada situasi krisis yang membutuhkan kepastian. Dinamika internal Partai Sosial Demokrat yang akhirnya mengubah posisinya juga memberikan kontribusi penting terhadap konsolidasi politik domestik. Proses deliberasi internal partai menghasilkan keputusan yang kemudian diterima oleh sebagian besar aktor politik lainnya, menciptakan konsensus nasional. Akhirnya, perubahan di level domestik ini memperkuat legitimasi politik bagi perubahan kebijakan luar negeri Swedia.

Pada level sistem internasional, invasi Rusia ke Ukraina menjadi faktor yang paling menentukan dalam membentuk kalkulasi strategis Swedia. Ancaman yang ditunjukkan Rusia bukan lagi bersifat abstrak melainkan agresi nyata terhadap tatanan keamanan Eropa. Keputusan Finlandia untuk lebih dahulu mengajukan keanggotaan NATO juga memberikan tekanan strategis bagi Swedia. Keduanya menunjukkan bahwa dinamika antarnegara tetangga turut memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan luar negeri. Keputusan Swedia bergabung dengan NATO, oleh karena itu, mencerminkan respons terhadap perubahan struktural dalam sistem internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Swedia terjadi melalui proses multi-level yang kompleks. Perubahan ini mencerminkan bagaimana suatu negara menyesuaikan strategi keamanan nasionalnya ketika lingkungan strategis berubah secara drastis. Keputusan untuk bergabung dengan NATO menandai pergeseran dari strategi otonomi keamanan menuju sistem pertahanan kolektif yang dianggap lebih mampu menjawab ancaman kontemporer. Dalam perspektif sains dan teknik industri, temuan ini memperlihatkan relevansi konsep sistem adaptif, manajemen risiko krisis, dan respons organisasi terhadap tekanan eksternal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada kajian kebijakan luar negeri, tetapi juga memperkaya pemahaman lintas disiplin mengenai bagaimana entitas besar beradaptasi di tengah ketidakpastian sistemik.

REFERENSI

- Aggestam, L., & Hyde-Price, A. (2025). Crossing the Rubicon: Explaining Sweden's decision to join NATO. *The British Journal of Politics and International Relations*, 1–25. <https://doi.org/10.1177/13691481251341683>
- Atlantic Council. (2024). Sweden and NATO: Strategic implications after the Ukraine war. Atlantic Council Report.
- Bjereld, U., & Oscarsson, H. (2023). Swedish public opinion and NATO: Shifting patterns post-Ukraine invasion. *Journal of Nordic Politics*, 35(1), 45–67.
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Sage Publications.
- Duxbury, C. (2022, May 15). *Dramatic U-turns by Social Democrats in Sweden, Finland paved way to NATO*. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/dramatic-u-turns-by-social-democrats-in-sweden-finland-paved-way-to-nato/>
- Government of Sweden. (2023, March 22). History of Sweden and NATO. Retrieved from <https://www.government.se/government-policy/sweden-in-nato/history-of-sweden-and-nato/>
- Government of Sweden. (2024, April 17). Why Sweden joined NATO-A paradigm shift in Sweden's foreign and security policy. Retrieved from <https://www.government.se/speeches/2024/04/why-sweden-joined-nato---a-paradigm-shift-in-swedens-foreign-and-security-policy/>

- Holsti, K. J. (1982). Why nations realign: Foreign policy restructuring in the postwar world. Allen & Unwin.
- Jonsson, M. (2022). Sweden's strategic shift: From neutrality to NATO? The Arctic Institute. Retrieved from <https://www.thearcticinstitute.org/swedens-strategic-shift-navigating-nato-membership-path-forward/>
- Khorrami, K. (2024). Finland's NATO accession and its regional influence on Swedish security calculus. *Baltic Security Review*, 29(1), 22–38.
- Meleshchenko, T. (2024). Transformation of the European security system in the light of Sweden and Finland's accession to NATO. *Foreign Affairs*, 34(2), 36–42. [https://doi.org/10.46493/2663-2675.34\(2\).2024.36](https://doi.org/10.46493/2663-2675.34(2).2024.36)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Mitchell, S. (2024). Sweden's security identity in flux: From neutrality to alliance. *European Foreign Policy Journal*, 48(2), 103–125.
- Mitchell, J., Bohman, A., & Eger, M. A. (2024). Rally around the flag? Explaining changes in Swedish public opinion toward NATO membership after Russia's invasion of Ukraine. *Acta Sociologica*, 68(1), 30–40. <https://doi.org/10.1177/00016993241268185>
- Moloeznik, M. P., Willoughby, R., & Kamps, J. (2025). Sweden: From neutrality to NATO membership. University of San Diego. <https://digital.sandiego.edu/psir-faculty>
- NATO. (2022, July 5). NATO Allies sign Accession Protocols for Finland and Sweden. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195468.htm
- NATO. (2025, March 7). *Sweden's impact on NATO*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IjIR7YvVJl4>
- Noreen, E. (2024). The Baltic pressure: Sweden's NATO turn and regional expectations. *Scandinavian Journal of International Relations*, 40(2), 112–130.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Sage Publications.
- Pearson, F. S., & Rochester, J. M. (1992). International relations: The global condition in the late twentieth century (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Podvorna, O. (2024). Sweden's accession to NATO: What is behind the decision? (PRIF Spotlight No. 8). Peace Research Institute Frankfurt.
- Rosenau, J. N. (1990). Turbulence in world politics: A theory of change and continuity. Princeton University Press.
- Simons, G., Persson, B., & Hedlund, M. (2019). Swedish neutrality and Russian threat narratives before 2022. *Journal of Strategic Studies*, 42(3), 321–343.
- Sozo, S. E. (2025, November 12). Interview with Daniel Blockert, Swedish Ambassador to Indonesia. Personal interview.
- Swedish Defence University. (2023, February 17). The consequences of NATO membership for Sweden's identity as a state. Retrieved from <https://www.fhs.se/en/swedish-defence-university/stories/2023-02-17-the-consequences-of-nato-membership-for-swedens-identity-as-a-state.html>
- The Telegraph. (2022, February 24). *Putin declares military offensive in Ukraine as invasion starts*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_5YeX8eCLgA
- The New York Times (2022, May 15). Sweden's governing party says it will vote in favor of joining NATO <https://www.nytimes.com/2022/05/15/world/europe/sweden-nato.html>
- Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish (2nd ed.). The Guilford Press.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Frankel, J. (1963). The making of foreign policy: An analysis of decision-making. Oxford University Press.

Hermann, C. F. (1972). Policy classification: A key to the comparative study of foreign policy. In J. N. Rosenau, V. Davis, & M. A. East (Eds.), *The analysis of international politics: Essays in honor of Harold and Margaret Sprout* (pp. 58-79). Free Press.